



Bantuan KMS Diminati Warga

Sosialisasi Dana JPD Dilakukan sampai RT/RW

YOGYAKARTA, KOMPAS — Bantuan dana pendidikan khusus bagi masyarakat tidak mampu diminati warga. Dari total 1.793 murid baru pemegang Kartu Menuju Sehat, sebanyak 1.722 orang di antaranya sudah mendaftarkan diri untuk memperoleh dana jaminan pendidikan daerah tersebut.

Perajin souvenir dari Kelurahan Minggiran, Kota Yogyakarta, Kindarto mengaku segera melegalisasi Kartu Menuju Sehat (KMS) setelah mendengar sosialisasi. Legalisasi KMS tersebut diperlukan sebagai syarat utama untuk memperoleh dana jaminan pendidikan daerah (JPD) tersebut.

"Ini untuk anak saya yang akan mendaftar ke SMP tahun ini," tuturnya saat mengantre legalisasi KMS di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Selasa (9/6).

Menurut Kindarto, dana JPD tersebut akan sangat meringankan beban biaya pendidikan karena

bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti seragam dan buku. Selama ini, biaya kebutuhan pribadi merupakan salah satu yang komponen biaya pendidikan yang paling besar.

Lebih membantu

Senada dengan itu, buruh serabutan asal Kelurahan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Supartono mengutarakan bantuan pendidikan JPD ini lebih membantu daripada bantuan lain yang pernah dia terima sebelumnya, seperti beras untuk warga miskin dan bantuan langsung tunai (BLT). Dengan bantuan ini, kelangsungan pendidikan

dua putranya akan lebih terjamin.

Bersama Supartono, terdapat 15 orang warga lainnya di rukun wilayah tempatnya tinggal yang mengurus KMS. "Kalau kebutuhan sehari-hari masih bisa diakali, tetapi untuk kebutuhan sekolah anak, mau tidak mau harus dipenuhi sehingga sulit kalau tidak ada jaminan," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Poncosiwi menuturkan, selama dua pekan terakhir, warga yang datang untuk melegalisasi KMS di loket legalisasi meningkat jumlahnya. Mereka adalah para wali murid pelajar yang akan mendaftar ke SMP, SMA, dan SMK negeri. "Loket tersebut memang khusus dibuka untuk melayani mereka," ujarnya.

Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori mengatakan, untuk menjangkau para pemegang KMS di Kota Yogyakarta, sosialisasi mengenai dana JPD telah dilakukan dari tingkat sekolah, kelurahan, hingga RT/RW.

"Kuota JPD sudah diperhitungkan sehingga pasti bisa mencakup setidaknya 90 persen dari semua murid baru pemegang KMS," kata Budi. (IRE)

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. JPD			

Yogyakarta, 16 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005